



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI MALUKU**

**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH  
PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2020-2024**

**Jl. R. A. Kartini No.22 Karang Panjang  
AMBON 97121**

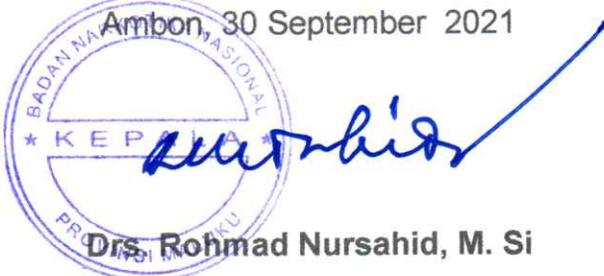
## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, Ren Proja Jangka Menengah dapat dirampungkan. Tujuan dari pembuatan Renproja ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan BNN Provinsi Maluku selama tahun 2020-2024 yang akan di laksanakan selama kurun waktu 5 Tahun..

Merujuk pada Perka BNN No 06 Tahun 2020 tentang Renstra BNN Tahun 2020-2024 hal ini mewajibkan kepada setiap satker baik di Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota harus menyusun rencana program kerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya oleh BNN Provinsi Maluku pada tahun 2015-2019 dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur ren proja jangka menengah yang akan datang dalam pencapaian target Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Maluku.

Saran dan masukan dari stakeholder terkait kami harapkan dapat membangun semangat dalam upaya menyelamatkan masyarakat khususnya di Provinsi Maluku dari ancaman narkoba serta sebagai bahan perbaikan kedepan sehingga memotivasi kami untuk lebih maju di masa yang akan datang.

Ambon, 30 September 2021



**Drs. Rohmad Nursahid, M. Si**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Daerah, lintas Satuan Kerja Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024.

Rencana Program Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENPROJA adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Satker Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Program Kerja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020- 2024 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Satker disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku serta berpedoman pada Rencana Strategis BNN RI serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2025.

Proses penyusunan Rencana Program Kerja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan dan penjaringan aspirasi melalui Forum Satuan Kerja BNN Provinsi Maluku yang melibatkan pegawai di lingkungan BNN Provinsi Maluku serta stakeholders terkait dan Instansi Vertikal BNN RI. Dokumen Renproja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Renproja BNN Provinsi Maluku yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan

pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024.

Dokumen Renproja BNN Provinsi Maluku tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan BNN Provinsi Maluku. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dokumen Renproja ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah BNN Provinsi Maluku yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja BNN Provinsi Maluku yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Satker.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renproja ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban BNN Provinsi Maluku sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan Renproja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 dimaksudkan agar BNN Provinsi Maluku mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Rencana Program Kerja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Renstra BNN RI Tahun 2020-2024 ke dalam rencana Satker.
2. Menjabarkan visi dan misi BNN Provinsi Maluku 2020-2024 ke dalam tujuan,

- sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
  4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## **A. KONDISI UMUM**

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Maluku pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Menyajikan data terkait permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Maluku. Jenis data yang dapat disajikan diantaranya;

a. Data kasus tindak pidana narkoba

No.	Nama Satker	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	BNNP Maluku	5 Berkas	14 Berkas	8 Berkas	15 Berkas	5 Berkas	16 Berkas
2.	BNNK Tual	0	0	0 Berkas	0	0	0
3.	BNNK Bursel	0	0	0 Berkas	0	0	0
Total		5 Berkas	14 Berkas	8 Berkas	15 Berkas	5 Berkas	16 Berkas

b. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary.

No.	Nama Satker	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Klinik BNNP Maluku	40	16	95	55	40	20
2.	Klinik BNNK Tual	30	8	24	24	10	13
3.	Klinik BNNK Buru Selatan	15	1	10	8	10	2

c. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

No.	Nama Satker	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Wilayah Maluku IP	5 Fasilitas	6 Fasilitas	5 Fasilitas	7 Fasilitas	7 Fasilitas	4 Fasilitas
2.	Wilayah Maluku KM	1 Fasilitas	0 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas

d. Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak).

No.	Nama Insantansi Pemerintah	Status	Keterangan
1.	Klinik Pratama BNNP Maluku	Aktif	Rawat Jalan
2.	Klinik Pratama BNNK Tual	Aktif	Rawat Jalan
3.	Klinik Pratama BNNK Buru Selatan	Aktif	Rawat Jalan
4.	Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku	Aktif	Rawat Jalan
5.	Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku	Aktif	Rawat Jalan

e. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.

No.	Nama Satker	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Wilayah Maluku IP	100 Klien	26 Klien	100 Klien	79 Klien	40 Klien	29 Klien
2.	Wilayah Maluku KM	-	32 klien	-	35 klien	-	-

f. Data penghuni lapas kasus penyalahgunaan narkoba.

**DATA NARAPIDANA NARKOTIKA TAHUN 2018 – 2021**

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2018	102 Orang
2.	2019	116 Orang
3.	2020	102 Orang
4.	2021	131 Orang

g. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah, perguruan tinggi, dll.

- Luas Wilayah Daratan : 712.479 Km<sup>2</sup>
- Luas Wilayah Laut : 31.982,50 Km<sup>2</sup>
- Jumlah Penduduk : Laki- Laki 936.478 orang  
: Perempuan 912.445 orang.
- Jumlah Kecamatan : 118 Kecamatan
- Jumlah Kelurahan : 35 Kelurahan
- Jumlah Desa : 1.200. desa
- Jumlah Fasilitas Kesehatan : 16 Rumah Sakit Umum
- Jumlah sarana Pendidikan :
  - SD sederajat : 1.950.
  - SMP sederajat : 814
  - SMA sederajat : 355
  - SMK sederajat : 115
  - Perguruan Tinggi Negeri : 3
  - Perguruan Tinggi Swasta : 18

h. Data SDM BNN di wilayah Provinsi (Termasuk BNN Kabupaten/Kota, jumlah dan kategorinya).

No	BNNP/BNNK	PNS	POLRI	TKK	JUMLAH
1.	BNNP Maluku	28	11	23	62
2.	BNNK Tual	9	1	16	26
3.	BNNK Buru Selatan	13	-	16	29
	Total	50	12	55	117

- i. Data sarana prasarana perkantoran (gedung kantor milik sendiri, sewa atau pinjam pakai).

No.	Nama Satker	Status Lahan	Status Gedung
1.	BNNP Maluku	Pinjam Pakai Pemda	Milik Sendiri
2.	BNNK Tual	Pinjam Pakai Pemda	Milik Sendiri
3.	BNNK Buru Selatan	Pinjam Pakai Pemda	Pinjam Pakai

- j. Sarana klinik BNNP

Terdiri dari alat-alat berupa stetoskope, tensimeter, nebulizer, Alat cek gula asam urat dan kolesterol, timbangan badan dan kasur pasien dan computer

- k. Sarana senjata api :

- Senjata Api Laras Panjang : 9 Pucuk
- Senjata Api Laras Pendek : 7 Pucuk
- Rompi Anti Peluru : 37 buah
- Borgol : 25 buah
- Amunisi : 3.375 Butir

- l. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya.

No.	Nama Satker	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Wilayah Maluku	87	87,66	88	64,41	88	96,00

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1. Potensi**

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN Provinsi Maluku untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode tahun 2021. Terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikembangkan oleh BNN Provinsi Maluku, yakni:

- Adanya perjanjian kerja sama antar lembaga Instansi Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi Maluku.
- Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi & kolaborasi melalui pelibatan banyak Instansi penegak hukum.

### **2. Permasalahan**

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Maluku, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Maluku adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Pelayanan pecandu narkoba belum berjalan maksimal disebabkan :
  1. Pecandu narkoba dan keluarganya belum mau memanfaatkan IPWL
  2. Terbatasnya fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi dan tidak merata di tiap daerah.
- b. Pecandu tidak mau berhenti menggunakan narkoba pada umumnya disebabkan oleh :
  1. Belum berfikir berhenti
  2. Masih ragu
  3. Tidak ada niat berhenti
  4. Tidak punya biaya untuk rehabilitasi

5. Masih dalam kondisi bekerja sehingga tidak ada waktu
  6. Belum diketahui oleh orang tua
  7. Belum tahu cara untuk rehabilitasi.
  8. Masih takut terhadap ancaman dari kelompok pengedar
- c. Peran Pemda dalam bersinegri masih belum optimal disebabkan
- Pemerintah masih menganggap persoalan narkoba bukan menjadi prioritas pembangunan daerah.
- d. Masyarakat belum imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba karena
1. Kepedulian keluarga terdekat terhadap korban penyalahgunaan narkoba masih minim.
  2. Masyarakat masih takut melapor secara sukarela karena jika melapor takut dikenakan hukuman pidana apabila menyalahgunakan narkoba

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL**

#### **A. TUJUAN ORGANISASI**

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan focus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Maluku sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL**

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Maluku merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Provinsi Maluku juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Maluku sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Interdiksi laut, udara dan darat di wilayah provinsi Maluku (kab-kota yang tidak ada BNN).
2. Pengungkapan kasus narkoba sampai pada jaringan kab-kota di wilayah Maluku
3. Adanya unit-unit rehabilitasi baik milik pemerintah atau swasta yang ada di kab-kota di Maluku.
4. Peran serta PEMDA menggerakkan OPD dalam pelaksanaan Inpres no.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN (Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

#### **A. RENCANA KINERJA**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Maluku menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi Maluku sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Maluku .

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

#### **B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN**

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 sebesar Rp 50.000.000.000 (*lima puluh miliar rupiah*), yang tersebar di 2 unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran. Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 secara detail di sajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renproja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renproja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renproja BNN Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renproja BNN Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renproja BNN Tahun 2020-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renproja ini.
5. Selain itu Renproja ini diharapkan mampu mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada :
  - 1) Menurunnya penyalahgunaan dan terkendalinya peredaran gelap narkoba;
  - 2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Kinerja**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	5 Kab/Kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	5 Kab/Kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	5 Kab/Kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,90	2,95	3,00	3,05	3,10
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Org	20 Org	20 Org	25 Org	25 Org
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Org	10 Org	10 Org	12 Org	12 Org

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	3 Unit	5 unit	7 unit	9 Unit	10 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	-	-	-	-	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	10 Berkas	8 Berkas	12 Berkas	14 Berkas	16 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)	-	-	1	1	1
11.			Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	90	92	94	96

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	2	4	4	5
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	92	94	94	96	98
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	2	2	3	4

*\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi Maluku*

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	299.000.000	300.000.000	350.000.000	375.000.000	400.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	69.000.000	50.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	284.991.000	300.000.000	350.000.000	360.000.000	380.000.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	50.000.000	237.000.000	250.000.000	260.000.000	280.000.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	345.948.000	223.096.000	350.000.000	370.000.000	400.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	-	-	-	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	98.430.000	222.405.000	250.000.000	270.000.000	300.000.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	-	-	-	-
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	-	-	-	-
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	50.000.000	100.000.000	120.000.000	135.000.000	160.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	567.603.000	567.603.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	160.550.000	341.950.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-	-	-	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian	Meningkatnya pengungkapan kasus	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)					
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP					
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	<b>109.122.000</b>	<b>61.089.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>85.000.000</b>
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP					
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	<b>180.900.000</b>	<b>150.975.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>185.000.000</b>

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan padabeberapa BNN Provinsi

**Lampiran**  
**Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020-2024**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>KOMPONEN/SUB KOMPONEN</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	Pengemangan keterampilan hidup (soft skill) di SMP dan SMU sederajat.
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Monitoring dan evaluasi.
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan Teknis
				Pemetaan kelompok sasaran di instansi pemerintah
				Pengembangkan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah
				monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah.
				monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat. Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan. Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan.
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika  Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Pemetaan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan  Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi  Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis masyarakat Monitoring petugas rehabilitasi.  Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		Sertifikasi petugas rehabilitasi.
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional  Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pembinaan teknis Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi Layanan klinik pratama. Monitoring fasilitasi rehabilitasi.
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk  Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pemetaan dan koordinasi. Pembentukan unit IBM. Operasional unit IBM.
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pengumpulan informasi intelijen.
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21  Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika  Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	Pembinaan teknis penyelidikan tindak pidana narkoba. Penyeledikan dan penyediaan kasus tindak pidana narkoba.
9.			Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkotika	Pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non narkoba.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan		
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Pengaasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Penyelenggaraan asesmen terpadu bagi penyalahgua narkotika.
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Penyelenggaraan pembinaan teknis bidang perencanaan. Perencanaan program dan anggaran.
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Koordinasi Penyusunan Laporan
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Penyesunana laporan keuangan.
			Layanan Perkantoran dan layanan umum	Operasional dan pemeliharaan kantor. Layanan umum rumah tangga.
13.	Pasca rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba.		Kajian kepuasan penerima layanan rehabilitasi	Pengelolaan data dalam rangka pembinaan lanjut. Pengelolaan data dalam rangka pembinaan lanjut.
14.			Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Hubungan masyarakat Kampanye/edukasi public

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Penyelenggaraan kehumasaan dan keprotokolan			Penyedia in'formasi publik
15.	Pengembangan organisasi,tatalaksana,dan sumber daya manusia(SDM)		Layanan manajemen sumber daya manusia(sdm)	Admistrasi kepegawaian Pembinaan kepegawaian Pelayanan kesehatan pegawai